Perkembangan Arena Kajian Antropologi Hukum

HAFFEZD AL ARSYAD
Email: haffezd.alarsyad10@gmail.com
No BP: 2110003600209
UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG

A. PENDAHULUAN

Antropologi berasal dari kata Yunani *άνθρωπος* (baca: anthropos) yang berarti "manusia" atau "orang", dan *logos* yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal.

Beberapa ahli mengutarakan pendapat mereka tentang pengertian antropologi yaitu :

1. William A. Havilan : Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
2. David Hunter : Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
3. Koentjaraningrat : Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

Konsep-konsep hukum masyarakat sederhana :

1. B.malinowski : ciri aturan hukum dapat diperinci

- dikatakan aturan hukum apabila atauran itu dirasakan dan dianggap menimbulkan kewajiban di satu pihak dan hak lain pihak
 - aturan hukum tu mempunyai sanksi negative atau sanksi positif berdasarkan kejiwaan dan adanya mekanisme
 - kekuatan mengikat itu terwujud dari adanya hubungan timbal balik
 - kekuatan mengikat itu didasarkan pada adanya hak untuk saling menuntut
2. J.H.Driberg : bahwa hukum itu meliputi semua peraturan prilaku yang mengatur sikap tindak baik perorangan atau kesatuan masyarakat secara menyeluruh.
 3. Cordozo : sutu prinsip atau aturan yg berbentuk untuk menjamin bahwa suatu prediksi mempunyai tingkat kepastian tertentu yang akan diterapkan dipengadilan jika wewenangya dilanggar.
 4. Dart :
 - bagaimana hubungan antara hukum dengan usaha menegakkan tata masyarakat
 - bagaimana hubungan antara kewajiban menurut hukum dan kewajiban menurut moral
 - apakah yg disebut dengan rule dan sejauh mana hukum itu sebagai rule
 5. Stone
 - hukum itu adalah suatu kerangka yang menyeluruh dan rumit
 - kerangka menyeluruh itu terdiri berbagai kaidah sosial yg mengatur prilaku manusia
 - kaidah itu mempunyai sifat-sifat sosial

B. PEMBAHASAN

Seperti halnya sosiologi, antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Koentjaraninggrat menyusun perkembangan ilmu Antropologi menjadi empat fase sebagai berikut:

- Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)

Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi. Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi.

- Fase Kedua (tahun 1800-an)

Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

- Fase Ketiga (awal abad ke-20)

Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial.

- Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)

Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil mereka. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun. Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.

Metode penelitian antropologi hukum :

1. Metode Ideologis, metode ini dilakukan untuk penelitian penjajahan dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ideal (norma ideal) yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini memperoleh prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat.
2. Metode Deskriptif, penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dalam kenyataannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.
3. Study Kasus, biasanya mempelajari kasus perselisihan kelompok masyarakat, latar belakang kultur yang menyebabkannya dan rencana solusi penyelesaiannya.

Setiap masyarakat mempunyai persamaan terhadap suatu perkara, peristiwa, bahkan terhadap ideologi & karena itu yang menjaminnya dalam suatu kesatuan (komunitas). Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, melainkan merupakan budaya yang menyeluruh dari suatu masyarakat tertentu yang merupakan satu kesatuan sikap & perilaku. Budaya hukum ini merupakan ciri atau atribut dan sekaligus sebagai kontrol sosial dari suatu masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum ini juga sering disebut peradaban hukum atau pandangan hidup dari suatu masyarakat. Tanggapan ini merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai dan perilaku individu sebagai anggota masyarakat menggambarkan orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum yg dihayati masyarakat bersangkutan.

Metode Pendekatan dalam Antropologi Hukum :

1. Metode Historis mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Perkembangan karakteristik budaya merupakan awal budaya masyarakat. Budaya hukum yaitu ide, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum.

2. Metode Deskriptif Prilaku menggambarkan perilaku manusia & budaya hukumnya termasuk melukiskan / menggambarkan perilaku nyata jika mereka sedang berselisih / bersengketa. (melihat sistem hukum mana yg digunakan (hukum adat atau hukum Negara))
3. Metode Study Kasus mempelajari kasus hukum & penyelesaiannya yg berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan alternative terakhir.

Perbedaan antara Antropologi Hukum dengan Hukum Adat :

Antropologi hukum :

1. Objeknya yaitu perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum.
2. Metodenya bersifat menyeluruh (Holistik) mempelajari akibat yang timbul.
3. Aktifitasnya lebih banyak di lapangan (mempelajari sengketa, perilaku masyarakat).
4. Berlakunya norma hukum pada tataran akhir.

Hukum adat :

1. Objeknya yaitu norma-norma hukum diluar hukum tertulis.
2. Pendekatan Yuridis Normatif (norma yang hidup & berkembang dalam masyarakat).
3. Aktifitasnya lebih banyak ditujukan pada kepustakaan, dokumen.
4. Berlakunya norma-norma hukum pada tataran awal.

Objek kajian antropologi hukum yaitu perilaku warga masyarakat yang dilihat dari latar belakang budaya.

Sosiologi hukum yaitu ilmu yg mempelajari bagaimana berlakunya peraturan per-UU-an dlm masyarakat.

Perbedaan Antropologi dgn Sosiologi hukum yaitu :

Antropologi Hukum

1. Lebih banyak ditujukan pada masyarakat pedesaan.

2. Membendingkan budaya masyarakat yang modern dengan tradisional.
3. Mempelajari cara berfikir & cara perilaku manusia yg bersifat Tradisional, Religius, & Magic.
4. Menilai hukum sebagai hal yg bersifat universal (hukum tidak hanya dalam desa, tetapi dalam perkotaan juga ada)
5. Lebih banyak mempelajari hukum yang tidak tertulis.

Sosiologi Hukum

1. Lebih banyak ditujukan pada masyarakat perkotaan.
2. Lebih fokus pada masyarakat yang sudah modern yg hukumnya sudah kompleks.
3. Mempelajari cara berfikir orang-orang yang bersifat Individualistik, Realistik, Liberalistik.
4. Menganggap bahwa hukum hanya ada dan berkembang dalam masyarakat modern saja.
5. Mempelajari aturan yg tertulis.

Manfaat Antropologi Hukum secara Teoritis :

- 1) Dapat mengetahui pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana & modern.
- 2) Dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai dasar yang dimiliki sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan terhadap nilai dasar tersebut.
- 3) Dapat mengetahui perbedaan pendapat / pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan.
- 4) Dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang masih kuat / fanatik mempertahankan keberlakuan nilai budaya mereka.
- 5) Dapat mengetahui suku bangsa/masyarakat mana yang memiliki norma perilaku hukum yg sudah tinggi dan mana yang tidak tinggi.

Norma Sosial akan menjadi Norma Hukum apabila :

1. Jika norma sosial itu ditetapkan oleh otoritas hukum, penguasa hukum, seperti hakim maka seketika norma tsb akan menjadi norma hukum & bersifat mengikat. Contoh : adat-Istiadat.
2. Jika norma sosial itu setelah melalui putusan para hakim akan menjadi pedoman bagi hakim berikutnya dlm kasus yg sama. Contoh : Penyelesaian sengketa adat.
3. Jika norma sosial itu menimbulkan hak dan kewajiban maka norma tersebut akan menjadi norma hukum. Contoh : jual beli, pinjam-meminjam, dll.
4. Norma social akan menjadi norma hukum apabila diberikan sanksi.

Tipe budaya hukum

1. Budaya parochial : cara berfikir anggota masyarakat, asih terbatas, maka tanggapannya terhadap hukum masih terbatas pada hukum lingkungannya sendiri.
2. Budaya subyek : tanggapan umum terhadap keluaran dari pemimpinnya sudah mulai ada, tetapi masukan dari masyarakat terhadap pengakuannya masih sangat kecil bahkan terbatas pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan, oleh karena itu aspirasi umum yang berkembang dimasyarakat tidak terserap.
3. Budaya partisipan : dimana anggota masyarakat mempunyai perilaku yg beragam , namun secara keseluruhan masyarakat sudah mengetahui hak, kewajiban dan kedudukannya didalam hukum maupun pemerintah juga mereka tidak mau dikucilkan dari keluaran hukum.

C. PENUTUP

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pengertian Antropologi dapat dilihat dari 2 sisi yaitu Antropologi sebagai ilmu pengetahuan artinya bahwa Antropologi merupakan kumpulan pengetahuan-pengetahuan tentang kajian masyarakat dan

kebudayaan yang disusun secara sistematis atas dasar pemikiran yang logis. Dan pengertian Antropologi yang kedua adalah cara-cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Manfaat di dalam antropologi hukum sangat luas. Antropologi hukum telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu hukum. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah dimana pun kita, kita tidak akan pernah jauh dari hukum selama kita berada di Negara hukum.

Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial (social status) artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Namun untuk mempermudah dalam pengertiannya maka dalam kedua istilah di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah “kedudukan” (status) saja. Nilai (Nilai Sosial) adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..